

# Badan Legislasi DPRA Bahas Rancangan Aceh Mengenai Grand Design Syariat Islam

Category: Aceh

written by Maulya | 13/05/2024



[ORINEWS.ID](https://www.orinews.id), Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Badan Legislasi (Banleg) sedang melakukan pembahasan secara berkelanjutan mengenai Rancangan Aceh, tentang Grand Design atau Rencana Induk tentang Syariat Islam.

Dalam serangkaian pertemuan yang sudah berlangsung beberapa kali, maka Banleg DPRA mengundang beberapa pihak terkait, termasuk 10 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) pelaksana, MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), serta melibatkan para Guru Dayah dan Perwakilan Ormas di Ruang Serbaguna Gedung DPRA, Senin, 13 Mei 2024.

Ketua Banleg DPR Aceh, Mawardi menyatakan bahwa Rancangan tersebut akan merumuskan strategi pelaksanaan Syariat Islam dalam

jangka waktu 20 tahun ke depan, dengan 5 target utama yang mencakup tata kelola pemerintahan, pendidikan, kepastian hukum, dan ekonomi. Ragan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pembangunan Aceh dalam berbagai sektor, termasuk lingkungan, keuangan, dan ekonomi, serta akan dievaluasi secara berkala untuk menetapkan target baru.

Mawardi juga menjelaskan bahwa proses pembahasan Ragan melibatkan berbagai metode, termasuk diskusi internal antara pemerintah dan Badan Legislasi, serta roadshow ke beberapa kabupaten dan kota untuk mendapatkan masukan dari masyarakat luas, tokoh masyarakat, dan ahli di berbagai bidang terkait.

Para anggota Badan Legislasi dan pembicara lainnya menekankan pentingnya dukungan serta masukan dari seluruh masyarakat Aceh dalam penyempurnaan Ragan ini. Mereka juga menyoroti perlunya pengaturan yang bijaksana terkait penerapan Syariat Islam, termasuk aturan bagi non-Muslim.

Tgk H. Muhammad Yusuf A. Wahab (Tu Sop Jeunieb) yang juga hadir dalam pembahasan ragan tersebut menyampaikan bahwa perlu strategi untuk memperkuat wilayah syariah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Pertama persoalan syariat islam, kita ingin menemukan syariat islam dengan kecerdasan kita yang bisa kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Pemegang otoritas dan pemegang kewenangan ini harus bersinergi. Kita harus punya strategi untuk memperkuat wilayah syariah, juga perlu mensyariatkan perpolitikan di Aceh dan qanun yang bermoral buat generasi di pendidikan.” Ujar Tu Sop.

Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A.. Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh menegaskan bahwa Ragan ini merupakan arah kebijakan pembangunan Syariat Islam di Aceh dan akan menjadi panduan bagi semua lembaga pemerintah dalam menjalankan Syariat.

“Selama ini, sudah banyak qanun yang berkaitan dengan Syariat Islam, tetapi masih bersifat parsial. Ragan ini adalah arah

kebijakan dan pembangunan Syariat Islam yang harus dijalankan oleh semua lembaga pemerintah Aceh," kata Prof. Syahrizal.

Sementara itu, Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA Guru Besar menyoroti pentingnya menghindari tumpang tindih dengan qanun-qanun yang sudah ada, serta perlunya menjaga agar implementasi Syariat Islam sesuai dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin.

Dukungan dari berbagai pihak seperti Tim Pemerintah Aceh, Fakultas Hukum Unsyiah, MPU Aceh, Dinas Dayah Aceh, serta Satpol PP, menunjukkan komitmen bersama untuk menyempurnakan Ragan ini agar dapat menjadi landasan yang kokoh dalam implementasi Syariat Islam di Aceh, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. []